

**BAB IV
PENUTUP**

4.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa rata-rata Indikator Kinerja Utama pada tiap-tiap sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan dikategorikan Baik, dengan nilai rata-rata sebesar 105,59 % berdasarkan nilai standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 - 2018, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan Tahun 2016 dalam mencapai Misi dan Visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan moda transportasi umum	Prosentase keikutsertaan kabupaten/ kota dalam WTN	55,56	59,26	106,66
		Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi badan hukum	50,12	75,00	149,64
		Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	94,00	94,00	100,00
2.	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	79,00	78,80	99,75
		Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa Barat	100,00	72,59	72,59
3.	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	66,67	69,69	104,53
		Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	74,29	72,83	98,03
		Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	45,64	51,90	113,72
4.	Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan di ruas jalan Provinsi	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di jalan provinsi	21,00	20,03	95,38
		Rata-rata			105,59

Pada tahun 2016 beberapa keberhasilan yang di capai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat antara lain :

- a. Keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN makin meningkat, pada Tahun 2015 terdapat 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yang ikut serta dan pada Tahun 2016 dapat ditingkatkan menjadi 15 (lima belas) kabupaten/kota yang ikut serta dalam WTN, sehingga pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan WTN dari Pemerintah Pusat yang penyerahannya langsung dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur sehingga diharapkan nantinya transportasi publik di Jawa Barat semakin baik ;
- b. Ketersediaan AKDP di Jawa Barat pada tahun 2016 dicapai 94,00 %, sehingga diharapkan aksesibilitas AKDP di jalan Provinsi juga semakin meningkat, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan jasa transportasi khususnya AKDP semakin terlayani dengan baik;
- c. Kepemilikan angkutan umum AKDP yang berbadan hukum juga mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya relatif kecil dibanding yang masih belum berbadan hukum/ perseorangan, tetapi hal itu dapat mendorong tercapai program penataan angkutan umum di Jawa Barat serta mendorong tumbuhnya industri angkutan umum;
- d. Pembangunan dalam rangka peningkatan penyediaan dermaga/pelabuhan ASDP di Jawa Barat juga mengalami peningkatan sebesar 3,02 % dari target 66,67 % menjadi 69.69 %, hal ini tentu dapat meningkatkan pelayanan transportasi ASDP khususnya di daerah terpencil yang hanya dapat dijangkau oleh angkutan perairan di Danau atau di Sungai;
- e. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati dan Pengembangan Bandara Nusawiru, dalam tahun 2016 secara perlahan juga telah mengalami peningkatan. Peningkatan yang relatif kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan biaya untuk mewujudkan pembangunan BIJB dan pengembangan Bandara Nusawiru, namun sekecil apapun peningkatannya diharapkan dapat mendorong terwujudnya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati dan Pengembangan Bandara Nusawiru



Melihat capaian dan kategori penilaian, sangat baik kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan menunjukkan kinerja yang sangat baik, hal tersebut menunjukkan keberhasilan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintah Provinsi dibidang perhubungan, dan menjadikan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat merupakan sektor transportasi yang strategis dalam kerangka menunjang pembangunan daerah Jawa Barat khususnya pembangunan di sektor perhubungan.

4.2. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian kinerja yang mempengaruhi program pembangunan maupun program kegiatan. Namun kami menyadari bahwa segala upaya untuk pencapaian kinerja yang lebih baik sekecil apapun selalu mendapatkan hambatan dan pelaksanaannya tidak sesempurna sesuai dengan harapan. Hal ini akan berakibat terjadinya keterlambatan dalam pencapaian visi dan misi dan implementasinya di dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Beberapa kendala dan hambatan tersebut antara lain adalah :

1. Kendala peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, banyaknya peraturan di bidang perhubungan, baik darat, laut dan udara yang memerlukan kesamaan penafsiran untuk pelaksanaannya di segala tingkatan. Selain itu juga diperlukan harmonisasi peraturan perundangan bidang Perhubungan khususnya dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang kadang-kadang di lapangan menimbulkan kendala tersendiri untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah hukum di belakang hari. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masih akan memerlukan waktu panjang untuk menyesuaikan peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas; Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlah tentu memerlukan manajemen tersendiri untuk dapat menjalankan roda organisasi di Bidang/Balai/UPTD dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
Selain berkurang dari sisi jumlah, kebutuhan kompetensi di Bidang Darat/Laut dan Udara juga mendesak untuk dipenuhi, mengingat ketiga moda tersebut terdapat pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan sesuai yang ditentukan.
3. Keterbatasan Anggaran merupakan masalah klasik, namun hal ini perlu dikemukakan agar mendorong semua pihak untuk terus mencari alternatif pendanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berbagai keterbatasan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang dikelola pemerintah, menyebabkan fungsi-fungsi yang diemban organisasi seringkali tidak dapat dilaksanakan karena ketidakcukupan anggaran khususnya untuk pembangunan program/kegiatan Strategis di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, penyusunan anggaran belanja program/ kegiatan melalui pendekatan sistem *plafond* ('ceiling') telah turut menyulitkan satuan-satuan organisasi untuk menjalankan fungsi yang diembannya.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut di atas diperlukan rencana tindak lanjut berupa strategi yang dilakukan secara bersama untuk meningkatkan pelayanan bidang Perhubungan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Strategi skala prioritas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan harapan bahwa tujuan pencapaian visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai sasaran utama masih tetap dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
- b. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta semua stakeholder
- c. Strategi terobosan yang terencana dan bertahap agar tujuan akhir dari pelayanan bidang Perhubungan berupa penyelenggaraan perhubungan yang mengembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diwujudkan.

Dalam melaksanakan program / kegiatan tahun 2016 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelenggarakan bidang perhubungan untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, Sedangkan penanganan tugas pokok sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan lainnya belum maksimal dilaksanakan, mengingat penanganan bidang perhubungan memerlukan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta semua stakeholder.

Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan pada tahun tahun mendatang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mampu melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah Provinsi dibidang perhubungan dan menjadikan dinas yang dapat mendukung dalam kerangka pembangunan daerah Jawa Barat khususnya pembangunan di sektor perhubungan.